

PREDIKSI PENILAIAN ATAS UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2023

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	OPD	BOBOT			NILAI	
						Area	Indikator	Sub Indikator	Capaian	Target
1	2	3	4	5	7	15	16	17	18	19
1,	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	Tindak Lanjut Reviu Inspektorat (50)	INSPEKTORAT	13		50		50
				RKPD sesuai dengan RPJMD (50)	Bapedalitbang			50		50
			Pokok Pikiran	Input Pokir (50)	Bapedalitbang			50		50
				Kesesuaian Pokir (50)	Bapedalitbang			50		50
			Pengesahan Anggaran	Pakta Integritas Pengesahan Anggaran (100)	BPKAD			100		100
		Pencegahan Mark Up Anggaran	Standar Harga Satuan (SHS)	Evaluasi SHS (30)	BPKAD			30		30
				Penetapan SHS (30)	BPKAD			30		30
				Implementasi SHS (40)	BPKAD			40		40
			Analisis Standar Biaya (ASB)	Kelengkapan ASB (30)	BPKAD			30		30
				Penetapan ASB (30)	BPKAD			30		30
				Implementasi ASB (40)	BPKAD			40		40
		Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	Pemenuhan Alokasi Anggaran Wajib	Pemenuhan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (80)	BPKAD			80		80
				Efektivitas Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (20)	INSPEKTORAT, BPKAD			20		20
			Publikasi APBD	Publikasi APBD Per 31 Maret 2023 (100)	BPKAD, DINKOMINFO			100		100
		Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD	Pengawasan Bantuan Pemerintah	Pelaksanaan Evaluasi (50) -Evaluasi terhadap hibah dan/atau bantuan sosial dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota. -Evaluasi terhadap dana PEN dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana PEN.	BPKAD INSPEKTORAT			50		50
				Evaluasi Realisasi (50) Laporan Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial/ Dana PEN sesuai dengan RKPD dan/ atau RPJMD (program, penerima, dan nilai).	BPKAD INSPEKTORAT			50		50
			Pengendalian dan Pengawasan Anggaran	Tidak ada alokasi anggaran konstruksi pada APBD-P (25)	BPKAD			25		25
				Terselesaikannya pengadaan konstruksi dan Tidak Ada Defisit pada APBD di akhir tahun (25)	BPKAD			25		25
				Reviu SHS dan ASB (25)	INSPEKTORAT			25		25
				Tindak Lanjut Reviu SHS dan ASB (25)	BPKAD INSPEKTORAT			25		25
2,	PENGADAAN BARANG DAN JASA	Inovasi Pelaksanaan Pengadaan	Pemenuhan Komitmen TKDN dan	Pemenuhan Komitmen TKDN (30)	BPBJ ADPEMB	21		30		30

			e-Purchasing	Implementasi e-Purchasing (50)	BPBJ ADPEMB	12		50		50					
				Implementasi e-purchasing telah direviu maka diberikan nilai 20.	INSPEKTORAT			20		20					
				Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung	Pengadaan Langsung Melalui Sistem (50)			BPBJ ADPEMB	50		50				
					Konsolidasi Pengadaan (50)			BPBJ ADPEMB	50		50				
			Pengendalian Pengadaan	Reviu dan Transparansi Rencana Pengadaan	Reviu Perencanaan Pengadaan (50)			BPBJ ADPEMB / UKPBJ	50		50				
					Penayangan SIRUP per 31 Maret 2023 (50)				50		50				
				Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah	Reviu HPS 10 Kegiatan pada Proyek Strategis (70)			BPBJ ADPEMB / UKPBJ	70		70				
					5 Lelang Dini pada PBJ Strategis (30)			BPBJ ADPEM	30		30				
				Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	% Tindak lanjut Hasil Reviu yang ditindaklanjuti atas reviu Tata Kelola PBJ.			BPBJ ADPEM INSPEKTORAT	100		100				
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan dengan total nilai keseluruhan (tahun 2023) (70)			BPBJ ADPEM	70		70				
					Tindak Lanjut Pemda dalam melakukan Perbaikan atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2022 (30)			BPBJ ADPEM BAGIAN ORGANISASI	30		30				
				Vendor Manajemen System	Database Penyedia (50)			BPBJ ADPEM	50		50				
					Penilaian Kinerja Penyedia (50)			BPBJ ADPEM	50		50				
				Penguatan Profesionalisme UKPBJ	Penguatan SDM UKPBJ			Pokja UKPBJ permanen sesuai ABK (50)	BPBJ ADPEM	50		50			
								Pelaksanaan Seluruh Fungsi (25)	BPBJ ADPEM	25		25			
								Pemenuhan ABK (25)	BPBJ ADPEM	25		25			
			TPP Khusus PBJ		Konsep TPP kepada Pelaksana Fungsi pada UKPBJ (30)			BPBJ ADPEM	30		30				
					TPP diimplementasikan (70)			BPBJ ADPEM	70		70				
			3,		PERIZINAN			Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi Tata Ruang Daerah	Kabupaten/ Kota Nilai diberikan berdasarkan % RDTR yang tersedia Perkadanya dibandingkan dengan total RDTR yang seharusnya disusun oleh Pemda (100)	DPMTSP	12		100	
				Sarana dan Prasarana				Sistem Perizinan Online	% perizinan yang diproses secara online dibandingkan dengan jumlah perizinan seluruhnya yang diproses Pemda (100).	DPMTSP	100				100

			Tempat Layanan	1. <i>Front Office</i> , terdiri dari: o Tempat layanan informasi (10) o Ruang pengaduan (10) o Kotak Pengaduan (10) o Ruang konsultasi (30) 2. <i>Back Office</i> , berupa ruangan untuk Tim Teknis (20) 3. CCTV, terdiri dari: o Kamera CCTV (10) o <i>Control Room</i> Panel CCTV (10) Nilai total seluruhnya 100 Penilaian juga dilakukan atas kelayakan tempat layanan. Jika tidak representatif maka diberikan nilai pengurang.	DPMPTSP			100		100				
			Kemudahan Perizinan	Media Publikasi	Media Publikasi (50) 1. Media publikasi <i>offline</i> (25) 2. Media <i>online</i> (25)			DPMPTSP	50		50			
					Substansi Publikasi (50) Media publikasi pada masing-masing perizinan, minimal sudah mencantumkan: a. Persyaratan b. Jangka Waktu Pemrosesan/ Service Level Agreement c. Biaya d. Alur Pemrosesan Perizinan e. Informasi tracking			DPMPTSP	50		50			
				Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan (30)			DPMPTSP	30		30			
					Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (30)			DPMPTSP	30		30			
					Rencana Aksi Perbaikan Layanan Perizinan (40)			DPMPTSP	40		40			
				Proses Perizinan	Proses Perizinan (25)			DPMPTSP	25		25			
					TL Kendala Perizinan (75)			DPMPTSP	75		75			
				Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan			Jika sudah tersedia dokumen perencanaan pengawasan tahun 2023 maka berikan nilai 50	DPMPTSP	50		50		
			Jika sudah tersedia laporan hasil pengawasan tahun 2023 maka berikan nilai 50					DPMPTSP	50		50			
			Tindak Lanjut Reviu APIP		% Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi (100).			INSPEKTORAT	100		100			
			3, PENGAWASAN APIP	Kapasitas APIP	Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM			1. Kuantitas SDM pengawas (60) a. Fungsional: 80% b. Non Fungsional: 20% Perhitungan:	INSPEKTORAT	17		60		60
								2. Kualitas SDM (40) Persentase pemenuhan diklat minimum 120 jam oleh setiap pengawas.	INSPEKTORAT			40		40
					Kecukupan Anggaran			Kesesuaian dengan Regulasi (30) Prosentase hasil perhitungan Jumlah anggaran APIP dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APIP sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 dikalikan 30%.	INSPEKTORAT			30		30

		Efektivitas Anggaran (30) 1. Jika terdapat anggaran untuk pelatihan maka mendapatkan nilai 15% 2. Jika terdapat anggaran untuk sarana & prasarana maka mendapatkan nilai 15%	INSPEKTORAT
		TPP APIP (40) 1. SK Kepala Daerah yang menetapkan TPP sesuai SE Kemendagri No 700.1.1/8737/SJ. Jika terdapat regulasi TPP APIP diberikan nilai 20 2. Jika terdapat implementasi TPP APIP diberikan nilai 20	INSPEKTORAT
	Level Kapabilitas APIP	Jika Kapabilitas APIP (Hasil Penilaian BPKP): Level 1 – 20% Level 2 – 50% Level 3 – 80% Level 4 – 100% Level 5 – 100%	INSPEKTORAT
	Penguatan Kelembagaan	Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus (50) 1. Surat oleh Kepala Daerah kepada Gubernur/Mendagri terkait dengan konsultasi pemberhentian Inspektur atau Irban (10) 2. SK Kepala Daerah tentang pembentukan Pansel (10) 3. Laporan Pansel kepada Kepala Daerah (5) 4. Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagri terkait hasil pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban (5) 5. Surat Gubernur/ Mendagri menindak-lanjuti surat Kada (5) 6. SK Kepala Daerah tentang penetapan Jabatan Inspektur dan/atau Irban Definitif (5) 7. Inspektur Bersertifikasi (10) Sertifikasi Inspektur: CGCAE Jika belum definitif namun sudah bersertifikasi bisa diberikan nilai 10.	INSPEKTORAT DAN BKPSDM
	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Irban yang Melaksanakan PUTT (50) 1. Perkada OTK (10) 2. Laporan Inspektur tentang pengisian Jabatan Irban (khusus) (15) 3. Laporan inspektur provinsi/Irjen tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban (khusus) (25)	INSPEKTORAT
		Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND (40)	INSPEKTORAT
		Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen (20)	INSPEKTORAT
		Implementasi Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP (25)	INSPEKTORAT
	Pengendalian dan Pengawasan	Ketersediaan Perkada tentang FCP atau regulasi yang didalamnya mengatur tentang Pengendalian Kecurangan (15)	INSPEKTORAT
		1. Tersedianya regulasi (30) : - Perkada tentang perlindungan kepada pelapor (15) - SK Kada tentang pedoman/ tata cara penanganan pengaduan (15)	INSPEKTORAT

	30		30
	40		40
	100		80
	50		50
	50		50
	40		40
	20		20
	25		25
	15		15
	30		30

				2. Implementasi saluran pengaduan (40) Penilaian dilakukan berdasarkan professional judgement. Jika dinilai tindak lanjut belum efektif maka diberikan faktor pengurang.	INSPEKTORAT		40		40
				3. Laporan sosialisasi yang berisi kuesioner dan membuktikan bahwa tingkat pemahaman rata-rata peserta sosialisasi atas saluran dumas ≥ 80% (30) - absensi peserta - kuesioner - hasil kuesioner	INSPEKTORAT		30		30
				Probit Audit	5 Laporan Probit Audit yang memadai menurut professional judgement diberikan nilai 20 (100).		100		100
				Reviu dalam rangka pencegahan korupsi	1. Reviu RKPD (10)		10		10
					2. Reviu KUA PPAS (10)		10		10
					3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (10)		10		10
					4. Reviu SHS dan ASB (10)		10		10
					5. Reviu pelayanan publik: pendidikan (5)		5		5
					Reviu pelayanan publik: Kesehatan (5)		5		5
					Reviu pelayanan publik: dana transfer (5)		5		5
					6. Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Bantuan Keuangan) (5)		5		5
					Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Bantuan Hibah) (5)		5		5
					Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Bantuan Sosial) (5)		5		5
					7. Reviu Tata Kelola PBJ (10).		10		10
					8. Laporan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan Reviu Tata Kelola oleh Inspektorat (10)		10		10
					9. Laporan Reviu Manajemen ASN (10)		10		10
					10. Laporan Reviu Tata Kelola BMD (10)				
					11. Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah (10)				
				Sosialisasi Antikorupsi	Pelaksanaan Sosialisasi kepada 1. Legislatif (40)		40		40
					2. Eksekutif (30)		30		30
					3. Masyarakat (CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum) (30)		30		30
4,	MANAJEMEN ASN	Sistem Merit	Penilaian Sistem Merit	Penilaian memperhatikan: 1. Laporan Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit – dinilai 10	BKPSDM	9	10		10
				2. Hasil Penilaian KASN tentang Penilaian Sistem Merit: Buruk (100-174) = 0 Kurang (175-249) = 40 Baik (250-324) = 65 Sangat Baik (325-400) = 90	BKPSDM		90		90

Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan	1. Evaluasi Jabatan selesai (50)	BKPSDM
		2. Evaluasi Jabatan disampaikan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi (aplikasi SIMONA) (25)	BKPSDM
		3. Evaluasi Jabatan divalidasi oleh Kemendagri (d/h KemenPAN RB) (25)	BKPSDM
	Pelaksanaan Pengisian Jabatan	Evaluasi Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN (50)	BKPSDM
		Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka (50)	BKPSDM
	Sistem Informasi Kepegawaian	1. Database Kepegawaian (20) Pemda melakukan <i>update</i> database kepegawaian secara berkala.	BKPSDM
		2. Absensi elektronik (20)	BKPSDM
		3. Aplikasi Penilaian Kinerja (40) Apabila sudah ada aplikasi penilaian Kinerja yang telah dimanfaatkan diberikan nilai 50.	BKPSDM
		4. Integrasi Absensi Elektronik dengan Aplikasi Penilaian Kinerja (20)	BKPSDM
Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN	Tambahan Penghasilan Pegawai	1. TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (50)	BKPSDM
		2. Pemenuhan Kewajiban (50) Jika Perkada TPP telah mengatur pemberian sanksi terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP	BKPSDM
	Manajemen Kinerja Individu	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) – 25	BKPSDM
		2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan (contoh pada setiap tingkatan jabatan mewakili Eselon I, II, III sampai dengan pelaksana) - 25	BKPSDM
		3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) – 25	BKPSDM
		4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) – 25	BKPSDM
	Penegakan Kode Etik	1. Media/saluran pengaduan – (30)	BKPSDM
		2. Laporan pelanggaran kode etik – (30)	BKPSDM
		3. Laporan tindak lanjut atas pelanggaran kode etik pegawai – 40	BKPSDM
	Kepatuhan LHKPN	Kepatuhan (50) Penilaian mempertimbangkan: <input type="checkbox"/> Kepatuhan Eksekutif (20) <input type="checkbox"/> Kepatuhan Legislatif (20) <input type="checkbox"/> Kepatuhan BUMD (10)	BKPSDM

	50		50
	25		25
	25		25
	50		50
	50		50
	20		20
	20		20
	40		40
	20		20
	50		50
	50		50
	50		50
	25		25
	25		25
	25		25
	25		25
	30		30
	30		30
	40		40
	50		50

				Perluasan (50) Provinsi / Kota 1. Staf Khusus (25) 2. Ajudan (25)	BKPSDM			50		50
5	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	Penguatan Database Pajak	Database Pajak Daerah Terintegrasi	Pengelolaan Database - 30 Substansi Database - 70 1. Jika sebagian database Pajak masih manual maka nilai maksimal 30 (profesional judgement) 2. Jika Pemda memiliki database pajak Aktual dan Potensial, maka nilainya 30 3. Jika database pajak Aktual dan Potensial selalu dimutakhirkan, maka nilainya, maka nilainya 40 4. Jika database pajak Aktual dan Potensial memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka nilainya 50 5. Jika database pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah dengan perijinan, maka nilainya 60 6. Jika database pajak telah terintegrasi dengan dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, maka nilainya 70.	BAPENDA	11		30		30
					BAPENDA			70		70
			Database Tunggalan Pajak	Data Tunggalan Pajak (50) <input type="checkbox"/> Jika ada data tunggakan pajak maka diberikan nilai 50 <input type="checkbox"/> Jika tidak ada data tunggakan pajak diberikan nilai 0	BAPENDA			50		50
				Laporan Hasil Cleansing Data Pajak Daerah dan Pengawasan Cleansing Data Pajak oleh Inspektorat (50)	INSPEKTORAT			50		50
		Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	Implementasi Inovasi Pajak Daerah	1. Laporan Inovasi Pajak (50)	BAPENDA			50		50
				2. Efektivitas Upaya Inovasi Pajak (50)	BAPENDA			50		50
			Capaian Peningkatan Pajak Daerah	% capaian pajak daerah dibandingkan dengan targetnya	BAPENDA			100		100
			Capaian Hasil Penagihan Tunggalan Pajak daerah	% Realisasi hasil penagihan pajak dibandingkan dengan total tunggakan pajak	BAPENDA			100		100
		Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah (30)	BAPENDA			30		30
				Efektivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah (70) Efektivitas dinilai berdasarkan: - Pengawasan dan pemeriksaan pajak mampu meningkatkan pajak/ menagih tunggakan pajak - Pemberian sanksi kepada WP yang melanggar ketentuan pajak.	BAPENDA			70		70
			Tindak Lanjut Reviu	% Tindak Lanjut reviu optimalisasi pajak daerah	BAPENDA			100		100
6,	PENGELOLAAN BMD	Pengamanan Administrasi BMD	Database BMD	Keberadaan Aplikasi (30%) - Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 12% - Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 30%	BPKAD	11		30		30

--	--

		Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 108/2016 (20%)	
		Efektivitas (50%) Jika aplikasi penatausahaan BMD sudah efektif diimplementasikan dan menghasilkan output sesuai klasifikasi BMD asset tetap (7 klasifikasi) diberikan nilai: - Tanah (8%) - Peralatan dan Mesin (7%) - Gedung dan Bangunan (7%) - Jalan, Jaringan, dan Irigasi (7%) - Aset Tetap Lainnya (7%) - Konstruksi dalam Pengerjaan (7%) - Akumulasi Penyusutan (7%)	
	Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	Rekonsiliasi BMD (50)	BPKAD
		Inventarisasi BMD (50) Jika sudah dilakukan inventarisasi aset berupa salah satu di antaranya: 1. tanah; 2. peralatan dan mesin; 3. gedung dan bangunan; 4. jalan, jaringan dan irigasi; 5. Aset Tetap lainnya; 6. Aset tidak berwujud.	BPKAD
Pengamanan Fisik dan Hukum BMD	Pendanaan dan Sertifikasi BMD	Pendanaan (40) Timeline, target, anggaran sampai dengan 2025 (selesai di tahun 2025) (20) % realisasi target dan anggaran selama tahun berjalan (20)	BPKAD
		Capaian Sertifikasi (60) % BMD (Tanah) Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah aset seluruhnya.	
	Penguasaan Fisik BMD	BMD Tanah (50) Jumlah Bidang Tanah yang dikuasai oleh Pemda dibandingkan dengan total bidang tanah dikali 50%	BPKAD
		BMD Kendaraan (50) Total Jumlah kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat, termasuk alat transportasi air bermesin misalnya perahu yang bermesin, kapal, jetski, dst) yang dikuasai oleh Pemda dikurangi yang dikuasai pihak yang tidak berhak dibandingkan dengan total Total unit kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) dikalikan 50% $X = (T - Tk) / T \times 50\%$ <i>T=Total Kendaraan</i> <i>Tk=Total Kendaraan dikuasai yang tidak berhak</i>	BPKAD
Penertiban BMD	Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD	Database Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran (20)	DPRKPP

	20		20
	50		50
	50		50
	50		50
	40		40
	60		60
	50		50
	50		50
	20		20

			P3D/Pemekaran	Capaian Penertiban Penertiban PSU/ BMD dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran (80) Diberikan nilai apabila telah berhasil dilakukan penertiban Diperhitungkan dengan memperhitungkan total yang berhasil ditertibkan dibandingkan dengan database BMD dan/ atau PSU yang perlu ditertibkan. Realisasi BAST tidak terbatas pada dokumen BAST tetapi termasuk bukti lain yang disamakan dengan BAST misalnya penyerahan PSU oleh masyarakat.	DPRKPP			80		80
		Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD	Presentase tindak lanjut – 100 Perbandingan antara tindak lanjut dengan total rekomendasi (maksimal 100) Laporan hasil Reviu tata kelola dilakukan pada 2 tahun terakhir (2022-2023). Jika tidak ada laporan Reviu tata kelola pada 2 tahun terakhir maka tidak dapat diberikan nilai.	BPKAD dan INSPEKTORAT			100		100
			Penyalahgunaan BMD	1. Pakta Integritas Pemanfaatan BMD (40)	BPKAD			40		40
				2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan fasilitas kantor (30)	BPKAD			30		30
				3. Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan BMD Min 70 (30) Jika nilai survey di bawah 70 maka diberikan secara proporsional (max nilai 30).	BPKAD			30		30
						94		100		99,65

AREA INTERVENSI MCP TAHUN 2023

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR		
1	2	3	4		
1,	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD		
			Pokok Pikiran		
			Pengesahan Anggaran		
		Pencegahan Mark Up Anggaran	Standar Harga Satuan (SHS)		
			Analisis Standar Biaya (ASB)		
		Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	Pemenuhan Alokasi Anggaran Wajib		
			Publikasi APBD		
		Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD	Pengawasan Bantuan Pemerintah		
		2,	PENGADAAN BARANG DAN JASA	Inovasi Pelaksanaan Pengadaan	Pemenuhan Komitmen TKDN dan <i>e-Purchasing</i>
					Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung
Pengendalian Pengadaan	Reviu dan Transparansi Rencana Pengadaan				
	Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah				
	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ				
	Survey Kepuasan Masyarakat				
	Vendor Manajemen System				
Penguatan Profesionalisme UKPBJ	Penguatan SDM UKPBJ				
	TPP Khusus PBJ				
3,	PERIZINAN			Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi Tata Ruang Daerah
		Sarana dan Prasarana	Sistem Perizinan <i>Online</i>		
			Tempat Layanan		
		Kemudahan Perizinan	Media Publikasi		
			Pelayanan Masyarakat		
			Proses Perizinan		
		Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan		
			Tindak Lanjut Reviu APIP		
		4,	PENGAWASAN APIP	Kapasitas APIP	Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM
					Kecukupan Anggaran

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3	4
		Penguatan Kelembagaan	Level Kapabilitas APIP
			Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus
			Pengawasan Dugaan Penyimpangan
		Pengendalian dan Pengawasan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
			Probity Audit
			Reviu dalam rangka pencegahan korupsi
			Sosialisasi Antikorupsi
5,	MANAJEMEN ASN	Sistem Merit	Penilaian Sistem Merit
		Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan
			Pelaksanaan Pengisian Jabatan
			Sistem Informasi Kepegawaian
		Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN	Tambahan Penghasilan Pegawai
			Manajemen Kinerja Individu
			Penegakan Kode Etik
6	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	Penguatan Database Pajak	Database Pajak Daerah Terintegrasi
			Database Tunggakan Pajak
		Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	Implementasi Inovasi Pajak Daerah
			Capaian Peningkatan Pajak Daerah
			Capaian Hasil Penagihan Tunggakan Pajak daerah
		Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
			Tindak Lanjut Reviu
7,	PENGELOLAAN BMD	Pengamanan Administrasi BMD	Database BMD
			Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD
		Pengamanan Fisik dan Hukum BMD	Pendanaan dan Sertifikasi BMD
			Penguasaan Fisik BMD
		Penertiban BMD	Penertiban PSU/ BMD dikuasai Pihak Ketiga/BMD /P3D/ Pemekaran
		Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD
			Penyalahgunaan BMD